



RENCANA KERJA Tahun 2025

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kubu Raya

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Adi Sucipto KM. 15,2 Telp. (0561) 725546 Email: dkumppkkr@gmail.com
SUNGAI RAYA

Jalan Adisucipto KM. 15,2 Telp/Fax. (0561) 725546 Kode Pos 78391
Email : dkukmppkkr@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur patutlah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 2025 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 2025 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya selama satu tahun memberikan gambaran tentang apa yang akan dikerjakan dalam wujud kegiatan keseluruhan guna memperjelas tugas pokok dan fungsi sesuai dengan program yang ada.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 2025 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis untuk jangka waktu satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan kegiatan pembangunan.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 2025 Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, kiranya tidak berlebihan jika masukan, saran dan pendapat sangat kami harapkan demi penyempurnaan penyusunan dimasa yang akan datang.

Semoga Rencana Kerja (RENJA) 2025 ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam pengembangan dan perencanaan program pembangunan pada tahun-tahun mendatang

Sungai Raya, Juli 2024

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kubu Raya



Dr. M. Norasari Arani
Pembina Utama Muda
NIP.19630810 199603 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penyusunan	8
BAB.II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2023	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	25
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB.III TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN.	35
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	35
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	35
3.3 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025	36
BAB.IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	48
BAB.IV PENUTUP	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi, secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4).

Sejalan dengan hal itu dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan angka kemiskinan, pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang didukung dengan kemitrologian di Indonesia menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan , hal inipun telah ditegaskan sebelumnya melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota dimana Pembangunan Koperasi dan UMKM merupakan salah satu urusan wajib, dan Pembangunan Perdagangan dan perindustrian menjadi urusan pilihan.

Berdasarkan dengan hal tersebut telah ditetapkan pula Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 khusus untuk Bidang Ekonomi yaitu:

- 1) Menciptakan Bangsa yang berdaya saing
- 2) Meningkatkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan

Berdasarkan kedua misi tersebut maka kerangka pemberdayaan Koperasi dan UMKM diarahkan pada:

- 1) Pengembangan UKM yang berbasis iptek dan berdaya saing
- 2) Memberdayakan Koperasi melalui peningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggotanya

- 3) Memberdayakan Usaha Mikro melalui peningkatan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah.

Tentu saja dalam pelaksanaannya masih menghadapi masalah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota khususnya Dinas/Institusi yang berperan dalam pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian.

Kabupaten Kubu Raya merupakan Kabupaten Termuda di Kalimantan Barat, tercatat telah memiliki Koperasi sebanyak 537 unit yang tersebar pada 9 kecamatan, namun jumlah tersebut masih harus dikonfirmasi ulang ke lapangan karena diperkirakan masih terdapat koperasi lama yang sudah tidak aktif menjalankan usahanya. Koperasi di Kabupaten Kubu Raya terdiri dari 5 jenis Koperasi yaitu : Koperasi Produsen, Koperasi Konsumen, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Jasa dan Koperasi Pemasaran.

Berkaitan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut di atas maka pembangunan/pemberdayaan Koperasi dan UKM/IKM dilakukan dengan benar dan terencana yang berkesinambungan dari tahun ke tahun. Melalui laporan ini kami akan memuat Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Adapun dasar penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mengacu kepada peraturan pusat dan daerah antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 661, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
16. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
30. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
31. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
32. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
33. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435);
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
42. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
43. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);

44. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
45. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 12);
46. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 28);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 82);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 43);

50. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 104);
51. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 Nomor 10);
52. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 Nomor 11);
53. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 Nomor 20).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dimaksudkan untuk memberikan pedoman Pelaksanaan Progran dan Kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya setiap tahun agar dapat dilaksanakan secara terarah, tepat sasaran, efisien dan efektif sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Tujuan yang akan dicapai antara lain untuk :

- 1) Melaksanakan Program dan Kegiatan tepat waktu.
- 2) Mempercepat capaian target sasaran Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya.
- 3) Mensikronkan Kebijakan Pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah.

- 4) Melanjutkan pembangunan Koperasi dan UMKM yang pada tahun sebelumnya belum mencapai output optimal.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud Dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD

Untuk dapat mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 dapat dilakukan dengan mengukur kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya tahun 2023, maka ditetapkan indikator-indikator dengan katagori sebagai berikut:

- Inputs (masukan)
 - Outputs (Keluaran)
 - Outcomes (Hasil)
 - Benefits (Manfaat)
 - Impacts (Dampak)
- 1) Indikator Inputs adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan/peraturan, pelayanan umum, perundang-undangan dan sebagainya.
 - 2) Indikator Outputs adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik.
 - 3) Indikator Outcomes adalah indikator yang menggambarkan hasil nyata dari suatu keluaran kegiatan.
 - 4) Indikator benefit adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indicator hasil. Manfaat tersebut baru kelihatan/diketahui setelah beberapa waktu kemudian khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang.
 - 5) Indikator impacts memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan.

Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga pada umumnya baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan jangka panjang. Indikator impacts ini menunjukkan dasar pemikiran dilaksanakannya kegiatan yang menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.

Dari penetapan strategi yang ingin dicapai berdasarkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya dan setelah diidentifikasi ke berbagai komponen indikator, ditemukan bahwa kegiatan tahun 2023 sebagian besar meliputi 3 jenis indikator kinerja yaitu Inputs, outputs dan outcomes, sedangkan indikator benefit dan impacts baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitan dengan tugas dan sasaran Pengukuran kinerja disajikan pada formulir Pengukuran kinerja kegiatan / PKK.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

- 1) Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).
- 2) Tingkat Pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat Pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Hasil capaian baik kekurangan maupun kelebihanannya merupakan hasil kerja manajemen dalam mensinergikan berbagai sumberdaya dan keterlibatan seluruh komponen yang ada, tidak terkecuali pengaruh kondisi dan situasi yang melingkupinya.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

Dengan memperhatikan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan Tahun 2025 untuk mencapai beberapa tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan pengertian tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya menetapkan sasaran, kebijakan, program dan kebijakan dan pembangunan yang merupakan penjabaran dari tujuan sasaran yang dicapai. Tujuan-tujuan tersebut merupakan tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya dalam mewujudkan target yang telah ditetapkan. Atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, nilai pagu anggaran Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya tahun untuk 2024 adalah APBD tahun 2024 sebesar Rp. 7.290.948.940,- (*Laporan Keuangan Tahun 2023*).

Rincian realisasi anggaran tersebut meliputi :

Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Retribusi Daerah Pagu Anggaran sebesar Rp. 133.426.200,-.

Belanja Daerah

Belanja Operasi

- Belanja Pegawai Pagu Anggaran sebesar Rp. 4.057.045.131,-.
- Belanja Barang dan Jasa Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.613.860.830,-.

Belanja Modal

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pagu Anggaran Sebesar Rp. 1.344.771.007,-.

(Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2023)

Untuk mencapai beberapa tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya, hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut adalah:

- 1) Peralatan dan perlengkapan sarana/prasarana umum dalam melaksanakan tugas sehari-hari, terutama sarana mobilitas untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang menyebar di wilayah kabupaten Kubu Raya.
- 2) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk peningkatan kinerja.
- 3) Ketersediaan dana untuk mewujudkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk peningkatan kinerja.
- 4) Profesionalisme aparatur dan jabatan struktural untuk memperlancar kegiatan sehari-hari.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Kubu Raya

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan																
Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, danS ub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
						Indikator	Satuan			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2		3		4	5	6	7	8	9(8/7)	10	11(5+8+10)	12(11/5)
401		O1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Nilai SAKIP PD		%								
		O1	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		%								
		O1	2.01	0001	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daera	Dokumen	17	8	5	5	100%	4 Dokumen	17 Dokumen	100%
		O1	2.01	0006	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Laporan	4	2	1	1	100%	1 Laporan	4 Laporan	100%
		O1	2.01	0007	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	2	1	1	100%	1 Laporan	4 Laporan	100%
		O1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Orang								
		O1	2.02	0001	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	164	84	40	40	100%	40 Orang/Bulan	164 Orang/Bulan	100%
		O1	2.02	0005	3	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	2	1	1	100%	1 Laporan	4 Laporan	100%
		O1	2.02	0007	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	16	2	13	13	100%	1 Laporan	16 Laporan	100%
		O1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang Difasilitasi		Orang								
		O1	2:05	0002	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4	0	2	2	100%	2 Paket	4 Paket	100%
		O1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Penyediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Bulan								
		O1	2.06	0001	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	15	2	12	12	100%	1 Paket	15 Paket	100%
		O1	2.06	0004	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	8	12	4	4	100%	2 Paket	18 Paket	225%
		O1	2.06	0005	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang Disediakan	Paket	48	24	12	12	100%	12 Paket	48 Paket	100%
		O1	2.06	0006	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Paket	750	375	375	375	100%	1 Paket	751 Paket	100%
		O1	2.06	0009	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	476	238	119	119	100%	119 Dokumen	476 Dokumen	100%
		O1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah		Unit								
		O1	2.07	02	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	4	2	0	0	0%	0 Unit	2 Unit	50%
		O1	2.07	05	2	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeleur	Unit	8	4	2	2	100%	2 Unit	8 Unit	100%
		O1	2.07	06	3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Unit	30	16	6	6	100%	8 Unit	30 Unit	100%
		O1	2.07	10	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Unit	28	12	10	10	100%	6 Unit	28 Unit	100%
		O1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Laporan								

		01	02:08	02	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	72	48	12	12	100%	12	Laporan	72 Tahun	100%	
		01	02.08	04	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Laporan	72	48	12	12	100%	12	Laporan	72 Tahun	100%	
		01	2:09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara	Unit										
		01	02:09	0002	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	42	8	17	17	100%	17	Unit	42 Unit	100%	
		01	04:09	0009	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	150	100	25	25	0%	25	Unit	150 Unit	100%	
		01	05:09	0010	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	67	28	25	25	100%	14	Unit	67 Unit	100%	
		01	06:09	0011	5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana PendukungGedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	390	260	65	65	100%	65	Unit	390 Unit	100%	
		2	17	03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PERSENTASE KOPERASI AKTIF	%										
		2	17	03	2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Aktif yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	%										
		2	17	03	2.01	02	1 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi aktif dan sehat	Unit Usaha	40	20	10	10	100%	10	Unit Usaha	40 Unit Usaha	100%
		2	17	04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	PERSENTASE KSP/USP YANG SEHAT	%										
		2	17	04	2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KSP/USP yang Dinilai	%										
		2	17	04	2.01	02	1 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang sehat dapat penghargaan	Unit Usaha	200	100	50	50	100%	50	Unit Usaha	200 Unit Usaha	100%
		2	17	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PERSENTASE KOPERASI YANG MENGIKUTI DIKLAT PERKOPERASIAN	%										
		2	17	05	2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasi	Kegiatan										
		2	17	05	2.01	0001	1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Koperasi yang mengikuti Diklat Perkoperasian	Unit Usaha	160	80	40	40	100%	40	Unit Usaha	160 Koperasi	100%
		2	17	06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	PERSENTASE KOPERASI YANG PRODUKTIF	%										
		2	17	06	2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Kegiatan										
		2	17	06	2.01	01	1 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang direvitalisasi dan Jumlah Dokumen Pemutakhiran Data Koperasi	Unit Usaha	160	80	40	40	100%	40	Unit Usaha	160 Koperasi	100%
		2	17	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	RASIO PERTUMBUHAN WIRUSAHA BARU BERSKALA MIKRO	%										
		2	17	07	2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro yang Difasilitasi	%										
		2	17	07	2.01	0001	1 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Mendapatkan Bantuan Permodalan	Unit Usaha	74	24	50	50	0%	0	Unit Usaha	74 Unit Usaha	100%
		2	17	07	2.00	0002	2 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	60	0	30	30	0%	0	Unit Usaha	30 Unit Usaha	50%
		2	17	07	2.00	0004	3 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	118	18	50	50	0%	50	Unit Usaha	118 Unit Usaha	100%
		2	17	07	2.01	0005	4 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdavaap Usaha Mikro	Unit Usaha	430	400	15	15	0%	15	Unit Usaha	430 Unit Usaha	100%

2	17	08				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PERSENTASE USAHA MIKRO YANG MENINGKAT SKALA USAHANYA	%											
2	17	08	2.01			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Meningkatkan Skala Usahanya	Unit Usaha											
2	17	08	2.01	01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang terfasilitasi	Unit Usaha	25	0	25	25	0%	0	Unit Usaha	25	Unit Usaha	100%	
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	30					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN													
3	30	02				ROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERSENTASE PELAKU USAHA PERGUDANGAN YANG MEMILIKI IZIN												
3	30	02	2.02			Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Gudang yang Terdaftar												
3	30	02	2.02	0001	1	Fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang	Jumlah gudang yang terdaftar	Dokumen	80	24	36	36	100%	20	Dokumen	80	Dokumen	100%	
3	30	03				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PEDAGANGAN YANG DIBINA												
3	30	03	2.01			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan													
3	30	3	2.02	0001	1	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	20	10	5	5	100%	5	Dokumen	20	Dokumen	100%	
3	30	03	2.02			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Jumlah Kegiatan Pembinaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kegiatan											
3	30	03	2.02	02	1	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sosialisasi PKL dan Pedagang Tradisional	Dokumen	20	10	5	5	100%	5	Dokumen	20	Dokumen	100%	
3	30	04				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PERSENTASE KESETABILAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING LAINYA	%											
3	30	04	2.02			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian Kesetabilan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%											
3	30	04	2.02	0002	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	72	48	12	12	100%	12	Laporan	72	Dokumen	100%	
3	30	06				PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) BERTANDA TERA SAH YANG BERLAKU	%											
3	30	06	2.01			Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah Tera, Tera ulang dan Pengawasan	Kegiatan											
3	30	06	2.01	01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Pelayanan Tera / Tera Ulang	Jumlah Pelayanan Tera/ Tera Ulang berupa kebenaran hasil pengukuran	Unit	3.200	2100	550	550	100%	550	Unit	3.200	Alat	100%	
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	31					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													
3	31	02				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERTUMBUHAN IKM	%											
3	31	02	2.01			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah IKM yang Dibina	IKM											
3	31	02	2.01	04		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	Dokumen	2	0	2	2	0%	0	Dokumen	2	Dokumen	100%	
3	31	02	2.01	05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Pelatihan Pembinaan Manajemen IKM dan pelaku IKM yang dilatih, jumlah pelatihan pengembangan sentra-sentra industri potensial dan jumlah pameran yang	Dokumen	4	2	1	1	100%	1	Dokumen	4	Dokumen	100%	
3	31	03				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE KEPEMILIKAN IZIN INDUSTRI	%											
3	31	03	2.01			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Izin Usaha berbasis resiko yang dikeluarkan	%											
3	31	03	2.01	01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IUPI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan perindustrian	Dokumen	0	14	12	14	86%	12	Dokumen	40	Dokumen	0%	

3	31	3	2,01	0004	2	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan	Dokumen	2	0	1	1	100%	0	Dokumen	1	Dokumen	50%
3	31	04				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Pemenuhan Pelaporan oleh Pelaku Usaha kedalam SIINas	%										
3	31	04	2.01			Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Junlah Pelaku Usaha yang melakukan Pelaporan Kedalam SIINas	Pelaku Usaha										
3	31	4	2,01	0001	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	4	0	2	2	100%	4	Dokumen	4	Dokumen	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas

Sumberdaya aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh 62 orang personil dengan kondisi sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan komposisi kepangkatan sebagai berikut :

NO.	TINGKAT KEPANGKATAN	JUMLAH	
		Orang	%
1	2	3	4
1.	Golongan IV (Pembina)	5 Orang	8,33%
2.	Golongan III (Penata)	29 Orang	48,33%
3.	Golongan II (Pengatur)	2 Orang	3,33%
4.	Golongan I	0 Orang	0,00%
5.	Tenaga Honorer	24 Orang	40,00%
Jumlah		60 Orang	100%

- 2) Berdasarkan Komposisi jabatan sebagai berikut :

NO.	TINGKAT KEPANGKATAN	JUMLAH	
		Orang	%
1	2	3	4
1.	Eselon II b	1 Orang	1,67%
2.	Eselon III a	1 Orang	1,67%
3.	Eselon III b	4 Orang	6,67%
4.	Eselon IV a	3 Orang	5,00%
5.	Eselon IV b	1 Orang	1,67%
6.	Fungsional	14 Orang	23,33%
7.	Staf	12 Orang	20,00%
8.	Tenaga Honorer	24 Orang	40,00%
Jumlah		60 Orang	100%

- 3) Berdasarkan Komposisi pendidikan :

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
		Orang	%
1	2	3	4
1.	S-2	7 Orang	11,67%
2.	S-1	36 Orang	60,00%
3.	Diploma	5 Orang	8,33%
4.	SLTA	12 Orang	20,00%
5.	SLTP	0 Orang	0,00%
Jumlah		60 Orang	100%

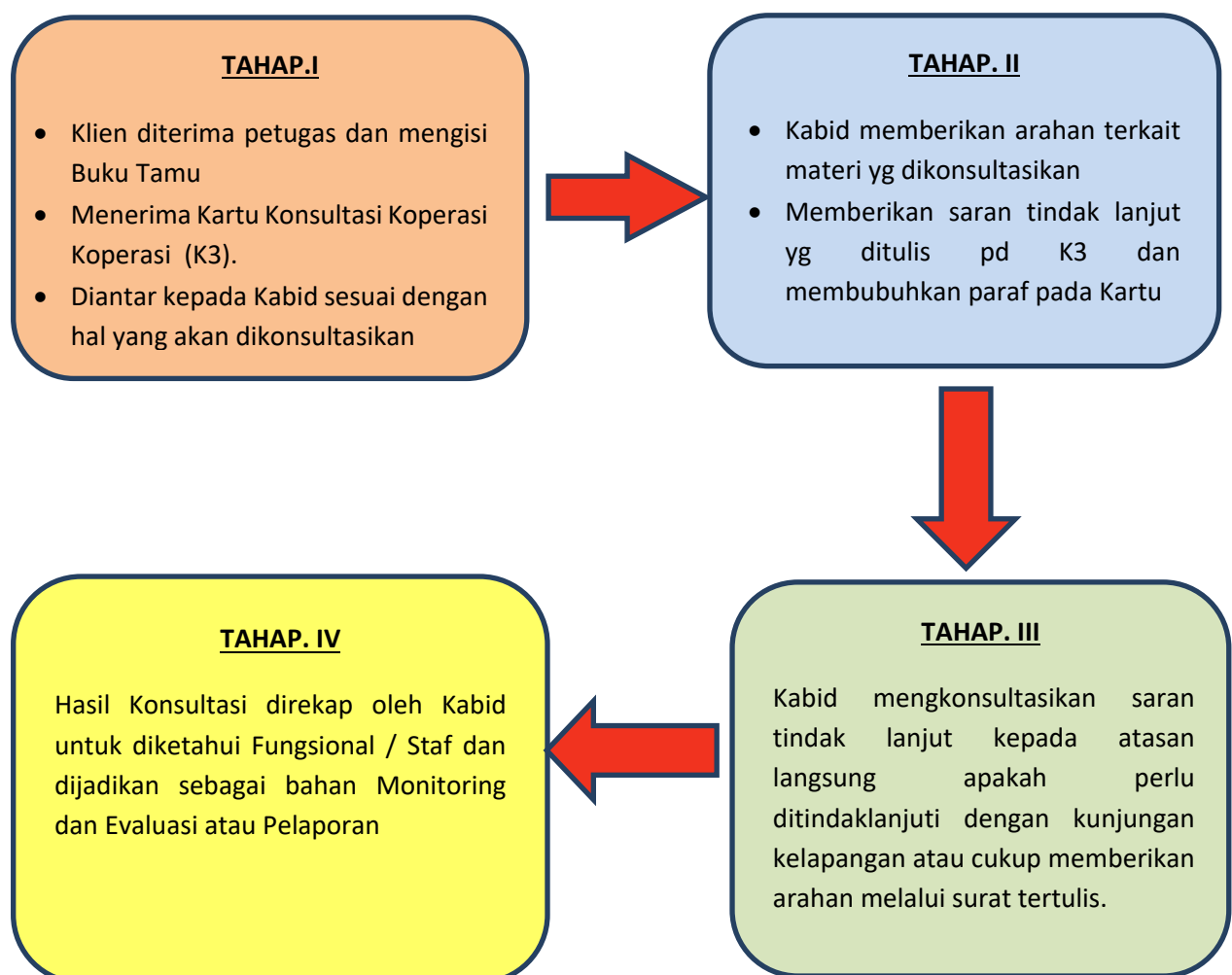
4) Manajemen Pelayanan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya tetap berupaya memberikan pelayanan prima kepada klien khususnya Gerakan Koperasi dan Pengusaha Mikro.

Sistem pelayanan menerapkan SOP (Standard Operasional Procedure).

Mekanisme pelaksanaan SOP adalah sebagai berikut :

Alur Pelayanan Terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian secara Umum (Pengurus/pengawas/karyawan) dan Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah.



Jenis pelayanan yang diberikan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan antara lain:

- 1) Aspek Kelembagaan dan Diklat
 - Pelayanan Pendirian Koperasi, Pengesahan Badan Hukum, Penggabungan/Peleburan/Pembubaran Koperasi.
 - Bimbingan Persiapan Rapat Anggota Tahunan (RAT)
 - Bimbingan Penyusunan Administrasi / Pembukuan Koperasi /Laporan Keuangan (Neraca/Rugi Laba, Buku Kas, Buku Bank, Persediaan, Inventaris Barang dll).
 - Pemeringkatan Koperasi /Penentuan Tingkat Kualitas Koperasi (Sangat Berkualitas, Berkualitas, Cukup Berkualitas, Kurang Berkualitas, Tidak Berkualitas)
 - Penilaian Koperasi Berprestasi / Penerima Award
 - Audit Koperasi (meliputi audit internal sedangkan audit eksternal dilakukan oleh Akuntan Publik)
 - Advokasi terhadap Koperasi yang bermasalah / memiliki sengketa
 - Penyusunan Database Koperasi
- 2) Aspek Pemasaran dan Jaringan Usaha
 - Pelayanan mendapatkan Label Halal, Merk Dagang, Barcode. Hak Patent atau hal – hal lain yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
 - Memfasilitasi kegiatan promosi seperti: Pameran tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional , Bazar.
 - Pengadaan Brosur, Profil Produk UMKM, E-Commerce, dll.
 - Memfasilitasi terciptanya Jaringan Usaha Koperasi yang erat seperti: pembinaan terhadap Forda (Forum Daerah) UKM, mendekatkan UMKM dengan Pedagang Besar, Pedagang Pengumpul, Supermarket dan Exportir dll.
 - Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Pasar Tradisional
- 3) Aspek Fasilitasi Permodalan.
 - Menginformasikan sumber sumber permodalan bagi K-UMKM (Perbankan, Dana Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), Corporate Social

Responsibility (CSR), Bansos, KUR, Sertifikasi Hak atas Tanah dll).

- Bimbingan Pembuatan Proposal Permodalan
 - Mengidentifikasi Koperasi yang layak untuk memperoleh permodalan
 - Memproses kelengkapan usulan permodalan yang diajukan.
 - Melakukan Pengawasan/Monitoring terhadap Koperasi yang telah mendapatkan pinjaman dari LPDB, BUMN/BUMS, Perbankan, Bansos dll.
 - Menilai Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam /Koperasi Jasa Keuangan Syariah
 - Memfasilitasi pembukaan Kantor Cabang KSP/KJKS.
- 4) Aspek Kemitraan dan Pengembangan Usaha
- Memfasilitasi / membimbing Koperasi dan UMKM yang menjalin pola Kemitraan
 - Melakukan pendampingan dalam penyusunan Perjanjian Kerjasama Pola Kemitraan antara Perusahaan dan Pengurus Koperasi, antara Pengurus Koperasi dan Anggota Koperasi selaku plasma.
 - Meningkatkan kualitas / mutu Produk K-UMKM agar dapat berdaya saing(penyempurnaan kemasan, kualitas rasa/design, pengenalan International Standard Organisation ISO, dll)
 - Menjalinkan kerjasama / kemitraan Koperasi dan UMKM dengan stakeholder(Dekopinwil,Dekopinda,KadinProv/Kab, Perusahaan selaku Bapak Angkat,BUMN/BUMD,Business Development Service)
 - Mengidentifikasi teknologi / mesin /alat yang dibutuhkan K-UMKM dalam proses produksi
 - Membentuk dan membina Sentra UKM di daerah
 - Mengidentifikasi produk unggulan daerah
 - Memperkenalkan OVOP (One Village One Product)
 - Memfasilitasi Program Wirausaha Pemula

Pelayanan terhadap Koperasi dan UMKM dilakukan setiap hari kerja di Kantor ataupun di lapangan sesuai dengan situasi dan kondisi.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
Kabupaten Kubu Raya

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Koperasi yang Sehat			18%	20%	22%	24%	18%	-	22%	24%	
2	Persentase UMKM yang Sehat			60%	70%	75%	80%	60%	-	80%	90%	
3	Persentase IKM yang di Bina			15%	20%	25%	30%	15,00%	-	25%	30%	
4	Persentase Pertumbuhan Perdagangan Formal			30%	35%	40%	45%	30%	-	40%	45%	
5	Peningkatan Akuntabilitas Daerah dan Pelayanan Publik			BB	BB	BB	BB	BB	-	BB	BB	
				71,5	71,5	71,5	71,5	71,5		72	72,5	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas

1) Isu – Isu Lingkungan Internal

Peningkatan daya saing UMKM pada tahun 2025 merupakan tujuan yang sangat penting. Beberapa isu strategis internal yang bisa menjadi fokus untuk mewujudkan peningkatan tersebut antara lain:

1. Di Bidang Kemitraan dan Pengembangan Usaha Koperasi dan UMKM.
 - a. Koperasi dan UMKM belum menjalin kemitraan yang optimal dengan Pengusaha Besar atau Stakeholder
 - b. Pola Kemitraan yang diterapkan hanya terbatas pada Inti Plasma, Perdagangan Umum, dan Sub Kontrak namun Pola Waralaba dan Distribusi & Keagenan belum dilaksanakan secara intensif.
 - c. Kemitraan yang terjalin kurang didukung dengan kesepakatan yang kuat secara tertulis dalam bentuk MoU (Nota Kesepahaman) atau Kontrak/Perjanjian Kerjasama.
 - d. Usaha yang dikelola belum memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal sehingga masih terdapat lahan tidur, limbah / bahan bekas yang terabaikan.
 - e. Usaha yang dikembangkan masih banyak dalam skala mikro dan belum dikembangkan secara terfokus dalam bentuk sentra.

Akibat / dampak yang timbul dari isu – isu tersebut antara lain:

- Persaingan yang tidak sehat dan saling mematikan
- Terjadinya monopoli
- Munculnya distorsi dalam pasar
- Usaha menjadi kurang efisien

2. Di Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Koperasi dan UMKM
 - a. Penyebarluasan informasi pasar sangat terbatas
 - b. Peran Koperasi dalam pemasaran produk masyarakat masih lemah

- c. Belum tersedianya Pusat Oleh-oleh di kawasan strategis
- d. Pelaku usaha terikat dengan pedagang tertentu
- e. Pengetahuan masyarakat tentang system pemasaran masih rendah
- f. Keuntungan Pedagang Perantara terlalu besar
- g. Penanganan pasca panen masih rendah
- h. Kemasan produk yang dijual masih sederhana

Akibat / dampak yang timbul dari isu – isu tersebut antara lain:

- Nilai jual komoditi usaha masyarakat rendah
- Tingkat pendapatan rendah
- Rantai pemasaran terhambat
- Daya saing pemasaran produksi masyarakat lemah

3. Di Bidang Kelembagaan dan Diklat Koperasi dan UMKM.

- a. Belum semua SDM Koperasi mendapat pelatihan perkoperasian, manajemen usaha kecil, akuntansi, kewirausahaan dll.
- b. Pelatihan SDM Koperasi dan UMKM belum menerapkan metode partisipatif
- c. Sarana pelatihan masih terbatas
- d. Rendahnya kesadaran dalam melaksanakan RAT
- e. Manajemen organisasi masih sederhana
- f. Koperasi belum memiliki sekretariat yang tetap

Akibat/dampak yang timbul dari isu – isu tersebut antara lain:

- Koperasi tidak dianggap sebagai lembaga yang professional.
- Tidak tertib dalam menjalankan administrasi.

4. Di Bidang Fasilitas Permodalan Koperasi dan UMKM

- a. Kerjasama dengan perbankan atau BUMN/BUMD untuk memberikan rekomendasi kepada Koperasi dan Usaha Mikro.
- b. Modal Koperasi dan UMKM terbatas.

- c. Pengurus Koperasi belum mampu membuat proposal yang standar.
- d. Belum ada kemauan pihak perbankan untuk membuka cabang di pelosok desa.

Akibat / dampak yang timbul dari isu – isu tersebut antara lain:

- Koperasi dan UMKM mengalami kesulitan
- Perkembangan usaha berjalan lamban
- Produktivitas usaha tidak meningkat.

2) Isu – Isu Lingkungan Eksternal

Isu – isu eksternal turut memicu bertambahnya permasalahan Koperasi dan UMKM antara lain;

- a. Dengan berlakunya AFTA (Asian Free Trade Area) dan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) maka produk lokal belum mampu bersaing karena harga produk impor lebih murah.
- b. Tingginya harga minyak dunia menjadikan kegiatan bisnis menjadi pemicu Highcost Economy.
- c. Resesi / krisis ekonomi dunia berdampak pada krisisnya perusahaan – perusahaan besar di Asia yang berpengaruh terhadap tingginya komponen-komponen / suku cadang bahan yang di impor Indonesia yang berpengaruh terhadap perusahaan di tanah air yang tergantung dengan peralatan impor tersebut.

Isu internal dan eksternal dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kubu Raya tentunya harus disikapi dan diatasi secara bertahap oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Sebagai kabupaten baru hasil pemekaran tahun 2007, Pemerintah Kabupaten telah melakukan satu tahapan RPJMD dari empat tahapan RPJMD yang direncanakan dalam RPJPD 2009-2029. Pembangunan yang dilakukan masih bertumpu pada pemenuhan kebutuhan dasar pemerintahan dan pelayanan dasar. Rentang geografis wilayah yang luas juga mempengaruhi pencapaian

target pembangunan di daerah menjadi tidak optimal ditambah dengan keterbatasan pembiayaan pembangunan yang belum memadai.

2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD

Mengingat permasalahan umum Pemerintah Daerah adalah terkait dengan aspek perekonomian seperti dilihat dari urusan Penanaman Modal, ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya tetap mengacu pada 14 (empat belas) Program yaitu:

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM);
6. Program Pengembangan UMKM;
7. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
8. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan ;
9. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting;
10. Program Pengembangan Ekspor;
11. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
12. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
13. Program Pengendalian Izin Usaha Industri ;
14. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Program-program tersebut untuk mengatasi isu-isu strategis dalam pembangunan daerah seperti pemerataan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya lapangan kerja yang tersedia serta belum optimalnya pengembangan sektor-sektor yang berpotensi dapat mendorong pembangunan sektor ekonomi daerah, seperti sektor pertambangan, pariwisata, perikanan dan pertanian. Pembangunan ekonomi wilayah dapat dilakukan dengan pendekatan terhadap sektor unggulan komparatif wilayah.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kabupaten Kubu Raya

Nama Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode				Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting					
				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target	Pagu Indikatif (Rp.)						
						Indikator	Satuan					Indikator	Satuan								
(1)				(2)		(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(2)		(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(14)	
401	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Kubu Raya	Nilai SAKIP PD		Poin	71,5	5.945.556.065	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Kubu Raya	Nilai SAKIP PD		Poin	71,5	5.945.556.065		
		01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kubu Raya	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen	11	83.544.542	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kubu Raya	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen	11	83.544.542		
		01	2.01	0001	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kubu Raya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daera	Dokumen	1	19.625.548	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kubu Raya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daera	Dokumen	1	19.625.548			
		01	2.01	0002	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kubu Raya	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	10.706.122	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kubu Raya	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	10.706.122			
		01	2.01	0003	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kubu Raya	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.531.041	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kubu Raya	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.531.041			
		01	2.01	0004	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Kubu Raya	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	10.285.335	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Kubu Raya	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	10.285.335			
		01	2.01	0005	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kubu Raya	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	12.167.750	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kubu Raya	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	12.167.750			
		01	2.01	0006	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kubu Raya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	14.996.884	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kubu Raya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	14.996.884			
		01	2.01	0007	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kubu Raya	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	8.231.862	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kubu Raya	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	8.231.862			
		01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kubu Raya	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dokumen	242	4.591.099.445	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kubu Raya	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dokumen	242	4.591.099.445	
		01	2.02	0001	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kubu Raya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	40	4.550.000.000	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kubu Raya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	40	4.550.000.000			
		01	2.02	0003	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kubu Raya	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	200	24.468.775	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kubu Raya	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	200	24.468.775			
		01	2.02	0005	3	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kubu Raya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	6.944.578	3	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kubu Raya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	6.944.578			
		01	2.02	0007	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kubu Raya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Laporan	13	9.686.092	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kubu Raya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Laporan	13	9.686.092			
		01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Kubu Raya	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Dokumen	8	6.300.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Kubu Raya	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Dokumen	8	6.300.000	
		01	2.03	0002	1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kubu Raya	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	2.300.000	1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kubu Raya	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	2.300.000			
		01	2.03	0006	2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kubu Raya	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	7	4.000.000	2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kubu Raya	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	7	4.000.000			
		01	2:05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kubu Raya	Jumlah ASN yang Difasilitasi		Orang	40	106.857.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kubu Raya	Jumlah ASN yang Difasilitasi		Orang	40	106.857.000	
		01	2:05	0002	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kubu Raya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	70.000.000	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kubu Raya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	70.000.000			

	01	2.05	0009	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kubu Raya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	12.686.000	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kubu Raya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	12.686.000
	01	2.05	0011	4	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kubu Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	24.171.000	4	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kubu Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	24.171.000
	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kubu Raya	Jumlah Penyediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	345.715.050		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kubu Raya	Jumlah Penyediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	345.715.050
	01	2.06	0001	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kubu Raya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	5	32.295.050	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kubu Raya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	5	32.295.050
	01	2.06	0002	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kubu Raya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	6.620.000	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kubu Raya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	6.620.000
	01	2.06	0004	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kubu Raya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	4	112.000.000	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kubu Raya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	4	112.000.000
	01	2.06	0005	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kubu Raya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	Paket	4	20.000.000	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kubu Raya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	Paket	4	20.000.000
	01	2.06	0006	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kubu Raya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	375	1.500.000	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kubu Raya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	375	1.500.000
	01	2.06	0009	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kubu Raya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	119	135.000.000	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kubu Raya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	119	135.000.000
	01	2.06	0011	7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kubu Raya	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	38.300.000	7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kubu Raya	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	38.300.000
	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kubu Raya	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	30	249.942.472		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kubu Raya	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	30	249.942.472
	01	2.07	0002	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kubu Raya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	79.000.000	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kubu Raya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	79.000.000
	01	2.07	0005	2	Pengadaan Mebel	Kubu Raya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	12.130.472	2	Pengadaan Mebel	Kubu Raya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	12.130.472
	01	2.07	0006	3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kubu Raya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	114.812.000	3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kubu Raya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	114.812.000
	02	2.08	0011	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kubu Raya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	44.000.000	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kubu Raya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	44.000.000
	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kubu Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	12	333.657.556		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kubu Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	12	333.657.556
	01	###	0002	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kubu Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	45.657.556	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kubu Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	45.657.556
	01	02.08	0004	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kubu Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	288.000.000	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kubu Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	288.000.000
	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kubu Raya	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara	Unit	129	228.440.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kubu Raya	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara	Unit	129	228.440.000
	01	###	0002	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kubu Raya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	116.000.000	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kubu Raya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	116.000.000
	01	2.09	0006	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kubu Raya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	54	35.940.000	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kubu Raya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	54	35.940.000
	01	2.09	0009	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kubu Raya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	40.000.000	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kubu Raya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	40.000.000
	01	###	0010	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kubu Raya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	25	18.500.000	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kubu Raya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	25	18.500.000
	01	###	0011	5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kubu Raya	Jumlah Sarana dan Prasarana PendukungGedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	29	18.000.000	5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kubu Raya	Jumlah Sarana dan Prasarana PendukungGedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	29	18.000.000
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					

2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kubu Raya	PERSENTASE KOPERASI AKTIF	%	100%	75.000.000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kubu Raya	PERSENTASE KOPERASI AKTIF	%	100%	75.000.000	
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah	Kubu Raya	Persentase Koperasi Aktif yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	%	100%	75.000.000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah	Kubu Raya	Persentase Koperasi Aktif yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	%	100%	75.000.000	
2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kubu Raya	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	10	75.000.000	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kubu Raya	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	10	75.000.000	
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kubu Raya	PERSENTASE KSP/USP YANG SEHAT	%	100%	85.000.000	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kubu Raya	PERSENTASE KSP/USP YANG SEHAT	%	100%	85.000.000	
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya	Kubu Raya	Persentase KSP/USP yang Dinilai	%	100%	85.000.000	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya	Kubu Raya	Persentase KSP/USP yang Dinilai	%	100%	85.000.000	
2	17	04	2.01	0001	1 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kubu Raya	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	10	85.000.000	1 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kubu Raya	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	10	85.000.000	
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kubu Raya	PERSENTASE KOPERASI YANG MENGIKUTI DIKLAT PERKOPERASIAN	%	100%	95.000.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kubu Raya	PERSENTASE KOPERASI YANG MENGIKUTI DIKLAT PERKOPERASIAN	%	100%	95.000.000	
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kubu Raya	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasi	Kegiatan	1	95.000.000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kubu Raya	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasi	Kegiatan	1	95.000.000	
2	17	05	2.01	0001	1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kubu Raya	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	60	95.000.000	1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kubu Raya	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	60	95.000.000	
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kubu Raya	PERSENTASE KOPERASI YANG PRODUKTIF	%	100%	110.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kubu Raya	PERSENTASE KOPERASI YANG PRODUKTIF	%	100%	110.000.000	
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kubu Raya	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Kegiatan	1	110.000.000	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kubu Raya	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Kegiatan	1	110.000.000	
2	17	06	2.01	0005	1 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kubu Raya	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi	Unit Usaha	60	110.000.000	1 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kubu Raya	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi	Unit Usaha	60	110.000.000	
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kubu Raya	RASIO PERTUMBUHAN WIRUSAHA BARU BERSKALA MIKRO	%	100%	1.203.373.844	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kubu Raya	RASIO PERTUMBUHAN WIRUSAHA BARU BERSKALA MIKRO	%	100%	1.203.373.844	
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kubu Raya	Persentase Usaha Mikro yang Difasilitasi	%	100%	1.203.373.844	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kubu Raya	Persentase Usaha Mikro yang Difasilitasi	%	100%	1.203.373.844	
2	17	05	2.01	0002	1 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kubu Raya	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	30	78.668.964	1 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kubu Raya	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	30	78.668.964	
2	17	06	2.00	0003	2 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kubu Raya	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	100	124.704.880	2 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kubu Raya	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	100	124.704.880	
2	17	07	2.01	0004	3 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kubu Raya	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	30	500.000.000	3 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kubu Raya	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	30	500.000.000	
2	17	07	2.01	0007	4 Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi	Kubu Raya	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	50	50.000.000	5 Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi	Kubu Raya	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	50	50.000.000	
2	17	07	2.01	0008	5 Pemulihan Usaha Mikro	Kubu Raya	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	50	300.000.000	6 Pemulihan Usaha Mikro	Kubu Raya	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	50	300.000.000	
2	17	07	2.01	0014	6 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Kubu Raya	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Unit Usaha	100	150.000.000	7 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Kubu Raya	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Unit Usaha	100	150.000.000	
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kubu Raya	PERSENTASE USAHA MIKRO YANG MENINGKAT SKALA USAHANYA	%	100%	100.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kubu Raya	PERSENTASE USAHA MIKRO YANG MENINGKAT SKALA USAHANYA	%	100%	100.000.000	
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kubu Raya	Jumlah Usaha Mikro yang Meningkatkan Skala Usahanya	Unit Usaha	20	100.000.000	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kubu Raya	Jumlah Usaha Mikro yang Meningkatkan Skala Usahanya	Unit Usaha	20	100.000.000	
2	17	08	2.01	0006	1 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kubu Raya	Jumlah Unit Usaha UMKM yang mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	20	100.000.000	1 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kubu Raya	Jumlah Unit Usaha UMKM yang mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	20	100.000.000	
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Kubu Raya	PERSENTASE PENYELESAIAN PERIZINAN PERGUDANGAN	%	100%	52.390.635	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Kubu Raya	PERSENTASE PENYELESAIAN PERIZINAN PERGUDANGAN	%	100%	52.390.635	

3	30	02	2.02			Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kubu Raya	Jumlah Gudang yang Terdaftar	Unit	36	52.390.635	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kubu Raya	Jumlah Gudang yang Terdaftar	Unit	36	52.390.635	
3	30	02	2.02	0001	1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kubu Raya	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen	36	52.390.635	1 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kubu Raya	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen	36	52.390.635	
3	30	03				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kubu Raya	PERSENTASE PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PEDAGANGAN YANG DIBINA	%	100%	33.193.331	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kubu Raya	PERSENTASE PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PEDAGANGAN YANG DIBINA	%	100%	33.193.331	
3	30	03	2.02			Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kubu Raya	Jumlah Kegiatan Pembinaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kegiatan	2	33.193.331	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kubu Raya	Jumlah Kegiatan Pembinaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kegiatan	2	33.193.331	
3	30	03	2.02	0001	1	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kubu Raya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	2	33.193.331	1 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kubu Raya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	2	33.193.331	
3	30	04				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kubu Raya	PERSENTASE KESETABILAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING LAINYA	%	100%	374.999.334	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kubu Raya	PERSENTASE KESETABILAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING LAINYA	%	100%	374.999.334	
3	30	04	2.02			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kubu Raya	Jumlah Kegiatan Pengendalian Kesetabilan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Laporan	14	374.999.334	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kubu Raya	Jumlah Kegiatan Pengendalian Kesetabilan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Laporan	14	374.999.334	
3	30	04	2.02	0002	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kubu Raya	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	12	174.999.334	1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kubu Raya	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	12	174.999.334	
3	30	04	2.02	0003	2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kubu Raya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	2	200.000.000	2 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kubu Raya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	2	200.000.000	
3	30	05				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Kubu Raya	PERSENTASE JUMLAH PROSUK UNGGULAN YANG DIPROMOSIKAN	%	100%	41.049.343	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Kubu Raya	PERSENTASE JUMLAH PROSUK UNGGULAN YANG DIPROMOSIKAN	%	100%	41.049.343	
3	30	05	2.02			Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kubu Raya	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Dagang	Produk	2	41.049.343	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kubu Raya	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Dagang	Produk	2	41.049.343	
3	30	05	2.01	0005	1	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kubu Raya	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Produk	2	41.049.343	1 Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kubu Raya	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Produk	2	41.049.343	
3	30	06				PROGRAM STANDARISASI DAN PERLIDUNGAN KONSUMEN	Kubu Raya	PERSENTASE ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) BERTANDA TERA SAH YANG BERLAKU	%	100%	253.000.000	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLIDUNGAN KONSUMEN	Kubu Raya	PERSENTASE ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) BERTANDA TERA SAH YANG BERLAKU	%	100%	253.000.000	
3	30	06	2.01			Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Kubu Raya	Jumlah Tera, Tera ulang dan Pengawasan	Kegiatan	2	253.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Kubu Raya	Jumlah Tera, Tera ulang dan Pengawasan	Kegiatan	2	253.000.000	
3	30	06	2.01	0001	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kubu Raya	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	570	215.000.000	1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kubu Raya	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	570	215.000.000	
3	30	06	2.01	0002	2	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Kubu Raya	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	2	38.000.000	2 Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Kubu Raya	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	2	38.000.000	
3	31					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
3	31					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						
3	31	02				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kubu Raya	PERTUMBUHAN IKM	%	100%	400.000.000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kubu Raya	PERTUMBUHAN IKM	%	100%	400.000.000	
3	31	02	2.01			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kubu Raya	Persentase Jumlah IKM yang Dibina	%	100%	400.000.000	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kubu Raya	Persentase Jumlah IKM yang Dibina	%	100%	400.000.000	
3	31	02	2,01	0004	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kubu Raya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	Dokumen	150.000.000	1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kubu Raya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	Dokumen	150.000.000	
3	31	02	2,01	0005	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kubu Raya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	Dokumen	250.000.000	2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kubu Raya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	Dokumen	250.000.000	
3	31	03				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Kubu Raya	PERSENTASE IKM YANG MEMILIKI AKUN SIINas	%	100%	145.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Kubu Raya	PERSENTASE IKM YANG MEMILIKI AKUN SIINas	%	100%	145.000.000	

3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri	Kubu Raya	Persentase Izin Usaha berbasis resiko yang dikeluarkan	%	100%	145.000.000	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri	Kubu Raya	Persentase Izin Usaha berbasis resiko yang dikeluarkan	%	100%	145.000.000	
3	31	03	2.01	0003	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Kubu Raya	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	1	100.000.000	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Kubu Raya	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	1	100.000.000	
3	31	03	2.01	0004	2 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Kubu Raya	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkatrisiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	1	45.000.000	2 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Kubu Raya	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkatrisiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	1	45.000.000	
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Kubu Raya	PERSENTASE PEMENUHAN PELAPORAN PELAKU USAHA KEDALAM SIINas	%	100%	140.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Kubu Raya	PERSENTASE PEMENUHAN PELAPORAN OLEH PELAKU USAHA KEDALAM SIINas	%	100%	140.000.000	
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan	Kubu Raya	Jumlah Pelaku Usaha yang melakukan Pelaporan Kedalam SIINas	Pelaku Usaha	3	140.000.000	Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan	Kubu Raya	Jumlah Pelaku Usaha yang melakukan Pelaporan Kedalam SIINas	Pelaku Usaha	3	140.000.000	
3	31	04	2.01	0001	1 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Kubu Raya	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	2	40.000.000	1 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Kubu Raya	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	2	40.000.000	
3	31	04	2.01	0003	2 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup	Kubu Raya	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke	Dokumen	1	100.000.000	2 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup	Kubu Raya	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke	Dokumen	1	100.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Proses penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan secara berjenjang dengan menampung aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan yang berasal dari 9 kecamatan di Kabupaten Kubu Raya. Khususnya untuk pembangunan Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, mayoritas usulan masyarakat antara lain:

1. Peningkatan Pencanaan dan Pembangunan Industri.
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Klaster Industri

Aspirasi-aspirasi tersebut kemudian ditampung dan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan diusulkan pada Tahun 2025.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Kubu Raya

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Besaran Volumen		Catatan Penting
		Alamat	Kecamatan		Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)			RASIO PERTUMBUHAN WIRUSAHA BARU BERSKALA MIKRO			
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			Persentase Usaha Mikro yang Difasilitasi			
	1 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jl. Adisucipto	Sungai Raya	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	10	Unit	Pengadaan Gerobak

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan dengan hal tersebut telah ditetapkan pula Misi rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 khusus bidang Ekonomi yaitu:

1. Menciptakan bangsa yang berdaya saing.
2. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Berdasarkan kedua misi tersebut maka kerangka pemberdayaan Koperasi dan UMKM secara nasional diarahkan pada:

1. Pengembangan UKM yang berbasis IPTEK dan berdaya saing.
2. Memperdayakan koperasi melalui peningkatan posisi tawar dan efisiensi kolektip para anggotanya.
3. Memberdayakan usaha mikro melalui peningkatan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah.

Tentu saja dalam pelaksanaannya masih menghadapi masalah yang menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota khususnya dinas/instansi yang berperan dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Beberapa tujuan yang akan dicapai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan antara lain :

1. Peningkatan kompetensi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2. Perluasan akses pembiayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
4. Penguatan kelembagaan usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

5. Perbaikan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari sasaran umum dan gambaran ranah dalam pencapaian tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Sasaran strategis dilengkapi dengan target kinerja yang dapat menjadi ukuran keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya. Sasaran tersebut meliputi antara lain :

1. Terwujudnya peningkatan kompetensi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
2. Terwujudnya perluasan akses pembiayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
3. Terwujudnya peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
4. Terciptanya penguatan kelembagaan usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
5. Terciptanya perbaikan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

3.3 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat meliputi :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
- 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

- 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya
- 2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3 Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2 Pengadaan Mebel
- 3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Koperasi Tahun Anggaran 2025 pada Bidang teknis antara lain sebagai berikut:

1. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

- 1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**
 - 1 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
- 2. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**
 - 1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**
 - 1 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- 3. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**
 - 1. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**
 - 1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
- 4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**
 - 1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**
 - 1 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Usaha Mikro Tahun Anggaran 2025 pada Bidang teknis antara lain sebagai berikut :

- 1. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**

1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

- 1 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
- 2 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
- 3 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- 4 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
- 5 Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi
- 6 Pemulihan Usaha Mikro
- 7 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro

2. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

- 1 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2025 pada Bidang teknis antara lain sebagai berikut:

1. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

1. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang

- 1 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

1. Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

- 1 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

3. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

1. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diTingkat Pasar Kabupaten/Kota

- 1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
- 2 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 1 Peningkatan Citra Produk Ekspor

5. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

- 1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
- 2 Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Perindustrian Tahun Anggaran 2025 pada Bidang teknis antara lain sebagai berikut:

1. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

1. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

- 1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
- 2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
- 3 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

2. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

- 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
- 2 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)

3. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

- 1 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
- 2 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup

Tabel 3.1.
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Kubu Raya

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				8.689.456.317				9.241.739.756
401	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP PD	Poin	Kubu Raya	72	6.642.332.736	Dana Alokasi Umum (DAU)	72,5	5.934.583.269
	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Kubu Raya	11	61.472.800	Dana Alokasi Umum (DAU)	11	80.315.796
	01	2.01	0001	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Kubu Raya	1	18.588.800	Dana Alokasi Umum (DAU)	1	19.625.548
	01	2.01	0002	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Kubu Raya	1	6.640.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	1	10.706.122
	01	2.01	0003	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Kubu Raya	1	5.640.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	1	7.531.041
	01	2.01	0004	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Kubu Raya	1	5.440.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	1	10.285.335
	01	2.01	0005	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Kubu Raya	1	5.444.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	1	12.167.750
	01	2.01	0006	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	Kubu Raya	5	13.920.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	5	10.000.000
	01	2.01	0007	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan	Kubu Raya	1	5.800.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	1	10.000.000
	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	Kubu Raya	254	5.067.926.873,50	Dana Alokasi Umum (DAU)	254	4.591.099.445
	01	2.02	0001	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Kubu Raya	40	5.034.756.873,50	Dana Alokasi Umum (DAU)	40	4.550.000.000
	01	2.02	0003	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Kubu Raya	200	23.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	200	24.468.775
	01	2.02	0005	3	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Kubu Raya	1	5.970.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	1	6.944.578
	01	2.02	0007	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Kubu Raya	13	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	13	9.686.092
	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	Kubu Raya	8	5.090.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	8	6.300.000
	01	2.03	0002	1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Kubu Raya	1	2.545.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	1	2.300.000
	01	2.03	0006	2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Kubu Raya	7	2.545.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	7	4.000.000
	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Difasilitasi	Orang	Kubu Raya	40	106.857.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	40	131.028.000
	01	2.05	0002	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Kubu Raya	2	70.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	2	70.000.000
	01	2.05	0009	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Kubu Raya	2	12.686.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	2	12.686.000
	01	2.05	0011	4	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Kubu Raya	3	24.171.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	3	48.342.000
	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	Kubu Raya	12	245.396.216	Dana Alokasi Umum (DAU)	12	313.800.000
	01	2.06	0001	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	Kubu Raya	5	40.068.848	Dana Alokasi Umum (DAU)	5	7.000.000
	01	2.06	0002	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kubu Raya	2	5.000.075	Dana Alokasi Umum (DAU)	2	-
	01	2.06	0004	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	Kubu Raya	4	41.619.293	Dana Alokasi Umum (DAU)	4	112.000.000

	01	2.06	0005	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	Paket	Kubu Raya	4	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	4	20.000.000	
	01	2.06	0006	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Kubu Raya	375	1.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	375	1.500.000	
	01	2.06	0009	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kubu Raya	119	113.808.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	119	135.000.000	
	01	2.06	0011	7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Kubu Raya	12	33.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	12	38.300.000	
	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	Kubu Raya	30	186.734.675	Dana Alokasi Umum (DAU)	30	249.942.472	
	01	2.07	0002	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Kubu Raya	2	79.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	2	79.000.000	
	01	2.07	0005	2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Kubu Raya	5	6.338.590	Dana Alokasi Umum (DAU)	5	12.130.472	
	01	2.07	0006	3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kubu Raya	15	57.396.085	Dana Alokasi Umum (DAU)	15	114.812.000	
	02	2.08	0011	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Kubu Raya	8	44.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	8	44.000.000	
	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	Kubu Raya	48	776.190.248	Dana Alokasi Umum (DAU)	48	333.657.556	
	01	02:08	0002	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kubu Raya	36	140.703.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	36	45.657.556	
	01	02.08	0004	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kubu Raya	12	635.487.248	Dana Alokasi Umum (DAU)	12	288.000.000	
	01	2:09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara	Unit	Kubu Raya	129	192.664.923	Dana Alokasi Umum (DAU)	129	228.440.000	
	01	02:09	0002	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Kubu Raya	17	83.070.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	17	116.000.000	
	01	2.09	0006	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kubu Raya	54	35.940.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	54	35.940.000	
	01	2.09	0009	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Kubu Raya	4	40.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	4	40.000.000	
	01	02:09	0010	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	Kubu Raya	25	15.654.923	Dana Alokasi Umum (DAU)	25	18.500.000	
	01	02:09	0011	5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana PendukungGedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	Kubu Raya	29	18.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	29	18.000.000	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PERSENTASE KOPERASI AKTIF	%	Kubu Raya	100%	24.221.622	Dana Alokasi Umum (DAU)	100%	75.000.000	
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Aktif yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	%	Kubu Raya	100%	24.221.622	Dana Alokasi Umum (DAU)	100%	75.000.000	
2	17	03	2,01	0004	2	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	Kubu Raya	10	24.221.622	Dana Alokasi Umum (DAU)	10	75.000.000
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	PERSENTASE KSP/USP YANG SEHAT	%	Kubu Raya	100%	43.008.103	Dana Alokasi Umum (DAU)	100%	85.000.000	
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu)	Persentase KSP/USP yang Dinilai	%	Kubu Raya	100%	43.008.103	Dana Alokasi Umum (DAU)	100%	85.000.000	
2	17	04	2.01	0001	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	Kubu Raya	10	43.008.103	Dana Alokasi Umum (DAU)	10	85.000.000
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PERSENTASE KOPERASI YANG MENGIKUTI DIKLAT PERKOPERASIAN	%	Kubu Raya	100%	29.919.894	Dana Alokasi Umum (DAU)	100%	95.000.000	
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasi	Kegiatan	Kubu Raya	1	29.919.894	Dana Alokasi Umum (DAU)	1	95.000.000	
2	17	05	2.01	0001	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	Kubu Raya	60	29.919.894	Dana Alokasi Umum (DAU)	60	95.000.000
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	PERSENTASE KOPERASI YANG PRODUKTIF	%	Kubu Raya	100%	44.830.016	Dana Alokasi Umum (DAU)	100%	110.000.000	

2	17	06	2.01			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Kegiatan	Kubu Raya	1	44.830.016	Dana Alokasi Umum (DAU)	1	110.000.000
2	17	06	2.01	0005	1	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	Kubu Raya	60	44.830.016	Dana Alokasi Umum (DAU)	60	110.000.000
2	17	07				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	RASIO PERTUMBUHAN WIRUSAHA BARU BERSKALA MIKRO	%	Kubu Raya	100%	1.038.721.275	Dana Alokasi Umum (DAU)	100%	1.203.373.844
2	17	07	2.01			Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro yang Difasilitasi	%	Kubu Raya	100%	1.038.721.275	Dana Alokasi Umum (DAU)	100%	1.203.373.844
2	17	05	2.01	0002	1	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	Kubu Raya	30	78.668.964	Dana Alokasi Umum (DAU)	30	78.668.964
2	17	06	2.00	0003	2	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	Kubu Raya	100	124.704.880	Dana Alokasi Umum (DAU)	100	124.704.880
2	17	07	2.01	0004	3	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	Kubu Raya	30	334.221.305	Dana Alokasi Umum (DAU)	30	500.000.000
2	17	07	2.01	0007	4	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	Kubu Raya	50	51.126.126	Dana Alokasi Umum (DAU)	50	50.000.000
2	17	07	2.01	0008	5	Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	Kubu Raya	50	300.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	50	300.000.000
2	17	07	2.01	0014	6	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Unit Usaha	Kubu Raya	100	150.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	100	150.000.000
2	17	08				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PERSENTASE USAHA MIKRO YANG MENINGKAT SKALA USAHANYA	%	Kubu Raya	100%	107.203.505	Dana Alokasi Umum (DAU)	100%	100.000.000
2	17	08	2.01			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Meningkatkan Skala Usahanya	Unit Usaha	Kubu Raya	20	107.203.505	Dana Alokasi Umum (DAU)	30	100.000.000
2	17	08	2.01	0006	1	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	Kubu Raya	20	107.203.505	Dana Alokasi Umum (DAU)	30	100.000.000
3	30	02				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERSENTASE PENYELESAIAN PERIZINAN PERGUDANGAN	%	Kubu Raya	100%	24.199.284	Dana Alokasi Umum (DAU)	100%	52.390.635
3	30	02	2.02			Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Gudang yang Terdaftar	Unit	Kubu Raya	36	24.199.284	Dana Alokasi Umum (DAU)	36	52.390.635
3	30	02	2.02	0001	1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen	Kubu Raya	36	24.199.284	Dana Alokasi Umum (DAU)	36	52.390.635
3	30	03				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PEDAGANGAN YANG DIBINA	%	Kubu Raya	100%	39.999.736	Dana Alokasi Umum (DAU)	100%	33.193.331
3	30	03	2.02			Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Kegiatan Pembinaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kegiatan	Kubu Raya	1	39.999.736	Dana Alokasi Umum (DAU)	2	33.193.331
3	30	03	2.02	0001	1	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	Kubu Raya	2	39.999.736	Dana Alokasi Umum (DAU)	2	33.193.331
3	30	04				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PERSENTASE KESETABILAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING LAINYA	%	Kubu Raya	100%	231.918.992	Dana Alokasi Umum (DAU)	100%	374.999.334
3	30	04	2.02			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian Kesetabilan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	Kubu Raya	14	231.918.992	Dana Alokasi Umum (DAU)	14	374.999.334
3	30	04	2.02	0002	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	Kubu Raya	12	29.999.983	Dana Alokasi Umum (DAU)	12	174.999.334
3	30	04	2.02	0003	2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	Kubu Raya	2	201.919.009	Dana Alokasi Umum (DAU)	2	200.000.000
3	30	05				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PERSENTASE JUMLAH PROSUK UNGGULAN YANG DIPROMOSIKAN	%	Kubu Raya	100%	17.091.797	Dana Alokasi Umum (DAU)	100%	41.049.343
3	30	05	2.02			Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Dagang	%	Kubu Raya	100%	17.091.797	Dana Alokasi Umum (DAU)	100%	41.049.343
3	30	05	2.02	0005	1	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Produk	Kubu Raya	2	17.091.797	Dana Alokasi Umum (DAU)	2	41.049.343
3	30	06				PROGRAM STANDARISASI DAN PERLIDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) BERTANDA TERA SAH YANG BERLAKU	%	Kubu Raya	100%	192.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	100%	287.150.000
3	30	06	2.01			Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah Tera, Tera ulang dan Pengawasan	Kegiatan	Kubu Raya	2	192.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	2	287.150.000
3	30	06	2.01	0001	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	Kubu Raya	570	154.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	590	247.250.000

3	30	06	2.01	0002	2	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	Kubu Raya	2	38.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	2	39.900.000
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	31					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
3	31	02				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERTUMBUHAN IKM	%	Kubu Raya	100%	184.112.725	Dana Alokasi Umum (DAU)	100%	550.000.000
3	31	02	2.01			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang Dibina	%	Kubu Raya	100%	184.112.725	Dana Alokasi Umum (DAU)	100%	550.000.000
3	31	02	2.01	0004	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	Kubu Raya	1	53.718.959	Dana Alokasi Umum (DAU)	1	150.000.000
3	31	02	2.01	0005	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	Kubu Raya	1	130.393.766	Dana Alokasi Umum (DAU)	1	300.000.000
3	31	02	2.01	0006	3	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	Kubu Raya	0		Dana Alokasi Umum (DAU)	0	100.000.000
3	31	03				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	PERSENTASE KEPEMILIKAN IZIN INDUSTRI	%	Kubu Raya	100%	30.691.695	Dana Alokasi Umum (DAU)	100%	150.000.000
3	31	03	2.01			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Izin Usaha berbasis resiko yang dikeluarkan	%	Kubu Raya	100%	30.691.695	Dana Alokasi Umum (DAU)	100%	150.000.000
3	31	03	2.01	0003	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	Kubu Raya	1	17.277.125	Dana Alokasi Umum (DAU)	1	100.000.000
3	31	03	2.01	0004	2	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkatrisiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala	Dokumen	Kubu Raya	1	13.414.570	Dana Alokasi Umum (DAU)	1	50.000.000
3	31	04				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Pemenuhan Pelaporan oleh Pelaku Usaha kedalam SIINas	%	Kubu Raya	100%	38.604.937	Dana Alokasi Umum (DAU)	100%	150.000.000
3	31	04	2.01			Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang melakukan Pelaporan Kedalam SIINas	Pelaku Usaha	Kubu Raya	3	38.604.937	Dana Alokasi Umum (DAU)	3	150.000.000
3	31	04	2.01	0001	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan	Dokumen	Kubu Raya	2	22.264.325	Dana Alokasi Umum (DAU)	2	50.000.000
3	31	04	2.01	0003	2	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	Kubu Raya	1	16.340.612	Dana Alokasi Umum (DAU)	1	100.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Secara detail rumusan rencana kerja, program, kegiatan, serta pendanaan atau anggaran indikatif Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya disajikan dalam tabel 4.1. sebagai berikut :

Tabel 4.1

Pagu Indikatif Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)			(2)		(3)
401	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		6.642.328.735
	01 2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		61.468.800
	01 2.01	0001	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.588.800
	01 2.01	0002	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.640.000
	01 2.01	0003	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.640.000
	01 2.01	0004	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	5.440.000
	01 2.01	0005	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.440.000
	01 2.01	0006	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.920.000
	01 2.01	0007	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.800.000
	01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.067.926.873
	01 2.02	0001	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.034.756.873
	01 2.02	0003	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23.200.000
	01 2.02	0005	3	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.970.000
	01 2.02	0007	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.000.000
	01 2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		5.090.000
	01 2.03	0002	1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.545.000
	01 2.03	0006	2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.545.000
	01 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		106.857.000
	01 2.05	0002	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	70.000.000
	01 2.05	0009	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12.686.000
	01 2.05	0011	3	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24.171.000
	01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		245.396.216
	01 2.06	0001	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.068.848
	01 2.06	0002	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.075
	01 2.06	0004	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.619.293
	01 2.06	0005	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000
	01 2.06	0006	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.500.000
	01 2.06	0009	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113.808.000
	01 2.06	0011	7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	33.400.000
	01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		186.734.675
	01 2.07	0002	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.000.000
	01 2.07	0005	2	Pengadaan Mebel	6.338.590
	01 2.07	0006	3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.396.085
	02 2.08	0011	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	44.000.000
	01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		776.190.248
	01 2.08	0002	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.703.000
	01 02.08	0004	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	635.487.248
	01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		192.664.923

		01	02:09	0002	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.070.000
		01	2,09	0006	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.940.000
		01	2,09	0009	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000
		01	2,09	0010	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.654.923
		01	2,09	0011	5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.000.000
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2	17					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2	17	03				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	24.221.622
2	17	03	2.01			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	24.221.622
2	17	03	2,01	0004	1	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	24.221.622
2	17	04				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	43.008.103
2	17	04	2.01			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah	43.008.103
2	17	04	2.01	0001	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	43.008.103
2	17	05				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	29.919.894
2	17	05	2.01			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	29.919.894
2	17	05	2.01	0001	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	29.919.894
2	17	06				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	44.830.016
2	17	06	2.01			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	44.830.016
2	17	06	2.01	0005	1	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	44.830.016
2	17	07				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.038.721.275
2	17	07	2.01			Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1.038.721.275
2	17	05	2.01	0002	1	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	78.668.964
2	17	06	2.00	0003	2	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	124.704.880
2	17	07	2.01	0004	3	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	334.221.305
2	17	07	2.01	0005	4	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	
2	17	07	2.01	0007	5	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi	51.126.126
2	17	07	2.01	0008	6	Pemulihan Usaha Mikro	300.000.000
2	17	07	2.01	0014	7	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	150.000.000
2	17	08				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	107.203.505
2	17	08	2.01			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	107.203.505
2	17	08	2.01	0006	1	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	107.203.505
3	30	02				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	24.199.284
3	30	02	2.02			Penerbitan Tanda Daftar Gudang	24.199.284
3	30	02	2.02	0001	1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	24.199.284
3	30	03				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	39.999.736
3	30	03	2.02			Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	39.999.736
3	30	03	2.02	0001	1	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	39.999.736
3	30	04				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	231.918.992
3	30	04	2.02			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	231.918.992
3	30	04	2.02	0002	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	29.999.983

3	30	04	2.02	0003	2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	201.919.009
3	30	05				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	17.091.797
3	30	05	2.02			Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	17.091.797
3	30	05	2.01	0005	1	Peningkatan Citra Produk Ekspor	17.091.797
3	30	06				PROGRAM STANDARISASI DAN PERLIDUNGAN KONSUMEN	192.600.000
3	30	06	2.01			Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	192.600.000
3	30	06	2.01	0001	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	154.600.000
3	30	06	2.01	0002	2	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	38.000.000
3	31					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
3	31					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	
3	31	02				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	184.112.725
3	31	02	2.01			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	184.112.725
3	31	02	2.01	0004	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	53.718.959
3	31	02	2.01	0005	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	130.393.766
3	31	03				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	30.691.695
3	31	03	2.01			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	30.691.695
3	31	03	2.01	0003	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	17.277.125
3	31	03	2.01	0004	2	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	13.414.570
3	31	04				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI	38.604.937
3	31	04	2.01			Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	38.604.937
3	31	04	2.01	0001	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	22.264.325
3	31	04	2.01	0003	2	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup	16.340.612
J U M L A H							8.689.452.316

BAB V

P E N U T U P

A. Catatan Penting

Rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan selain mengacu pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya juga mengacu kepada Renstra Nasional Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian RI serta Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat.

Catatan penting dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM adalah diselenggarakannya program Revitalisasi kelembagaan Koperasi yang terkoordinasi baik dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten mengingat pada tahun 2012 telah dikeluarkannya UU Nomor 17 Tentang Perkoperasian, sehingga sosialisasi UU tersebut dilakukan secara serempak dirangkaikan dengan kegiatan Revitalisasi kelembagaan guna menyesuaikan kelembagaan koperasi dengan UU dimaksud. Namun dalam perjalanannya pada tanggal 29 mei 2014, UU Nomor 17 Tahun 2012 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga Pembinaan koperasi kembali mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

B. Kaidah-kaidah Tindak Lanjut

Kaidah-kaidah yang harus disepakati untuk dilaksanakan dalam penjabaran Renja SKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Renja SKPD dijabarkan dalam bentuk Program dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang dapat memberikan manfaat optimal serta menyentuh kepentingan bagi masyarakat khususnya gerakan Koperasi dan UMKM.
2. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dirangkum dalam bentuk Rencana Strategis dan setiap tahun dituangkan dalam Renja SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Dalam pelaksanaan Renja SKPD harus disinkronkan/ disesuaikan dengan Rencana Strategis yang dibuat oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

4. Prinsip-prinsip *Good Governance* (Tata kelola pemerintahan yang baik) harus tetap diterapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan antara lain prinsip :
- *Transparansi* yaitu pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan secara terbuka yang dapat dilihat, dikaji dan dikritik oleh pihak-pihak terkait.
 - *Akuntabilitas* yaitu Segala bentuk kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara tertulis dalam bentuk laporan/SPJ berdasarkan ketentuan /peraturan yang berlaku.
 - *Demokrasi* yaitu Program dan kegiatan yang dilakukan merupakan aspirasi masyarakat khususnya Gerakan Koperasi dan UMKM yang telah dibahas bersama Pembina Koperasi dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam Musrenbang.
 - *Profesional* yaitu Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan efisien dan efektif, tepat sasaran, memberikan output dan Outcome yang jelas yang disampaikan melalui tenaga ahli yang menguasai bidangnya sehingga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

C. Rencana Tindak Lanjut

1. Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan harus diawasi agar tepat sasaran. Pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengendali Kegiatan dan Inspektorat Kabupaten Kubu Raya.
2. Selain melaksanakan program dan kegiatan yang tertera pada DPA, Pejabat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tetap melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam hal memberikan bimbingan teknis kepada Gerakan Koperasi dan Usaha Mikro.
3. Kegiatan yang dilaksanakan, namun belum mencapai target pada tahun ini maka harus dilanjutkan pada tahun berikutnya.